

## Busyro Ngaku Ponselnya Diretas Setelah Kritik TWK Pegawai KPK

JAKARTA (IM) – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Maqodas mengaku baru-baru ini ponselnya diretas atau di-hack. Dia menduga bahwa peretasan ada kaitannya dengan kritikannya soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. Busyro mengaku mendapat banyak serangan dari buzzer di media sosial (medsos). Namun, dirinya tak mengubris serangan buzzer-buzzer tersebut.

“Bahkan ada yang di-hack, barusan HP saya juga di-hack, dan sejumlah teman (mengalami hal yang sama) menjelang webinar ini,” kata Busyro dalam diskusi virtual yang ditayangkan dalam Youtube Sahabat ICW, Senin (17/5).

Busyro selaku mantan

Pimpinan KPK memang kerap mengkritik KPK atas kebijakannya. Termasuk dalam polemik TWK pegawai KPK ini Busyro pernah menilai bahwa KPK tamat di tangan Presiden Jokowi.

Dia mendesak agar Ketua KPK Firi Bahuri mengundang para mantan pimpinan KPK. Dia ingin agar Pimpinan KPK sekarang berdialog tentang polemik TWK pegawai KPK.

“Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan, undang wartawan biar publik, masyarakat bisa mengetahui lewat pemberitaan,” ucapnya.

Busyro juga mendesak agar Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal karena tidak mempunyai akibat hukum apapun. Konsekuensinya, kata dia, 75 pegawai KPK itu harus segera dikembalikan pada posisi semula. ● han

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## RAKER MENSOS DENGAN KOMISI VIII DPR

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/5). Rapat kerja tersebut membahas pengaturan kelembagaan dan anggaran dalam DIM RUU PB.



## AKSI BELA PALESTINA

Warga melakukan Aksi Bela Palestina di Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/5). Aksi itu mengancam tindakan agresi militer Israel ke Palestina.

## Habib Rizieq Dituntut 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

JAKARTA (IM) – Habib Rizieq Shihab (HRS) dituntut 10 bulan penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa HRS terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindakan tidak patuh protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas Covid-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Senin (17/5).

HRS dan kawan-kawan diyakini bersalah melanggar pasal berlap, yakni: Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, atau Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular atau Pasal 216 ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara para terdakwa Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,” ujar jaksa. Jaksa menyebut Rizieq diyakini datang menghadiri acara yang digelar di pondok pesantren miliknya tanpa memperoleh izin dari satuan tugas COVID-19. Habib Rizieq juga disebut melanggar masa karantina mandiri yang

seharusnya dijalanannya selama 14 hari.

“Terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari satuan tugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri 14 hari, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 terdakwa tetap saja mengendahkan untuk hadir melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Stadion Markaz Syariah TV di Pondok Pesantren Almar Agrokultural Markaz Syariah miliknya yang ada di Kp Babakan Pakancinan Desa Kuta Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan kedatangan Habib Rizieq ke Megamendung disambut oleh kurang lebih 3 ribu orang. Masyarakat yang datang, disebut jaksa tidak hanya berasal dari lingkungan pondok pesantren melainkan juga luar pondok pesantren. “Setibanya terdakwa di Simpang Gadag Kabupaten Bogor hingga ke pondok pesantren miliknya tersebut terdakwa telah disambut oleh lebih kurang 3.000 orang yang hadir, baik yang datang dari lingkungan pondok pesantren itu sendiri maupun dari luar lingkungan pondok pesantren,” kata jaksa.

Menurut jaksa, Habib Rizieq tidak berupaya mengimbau agar masyarakat tidak berkerumun. Namun Habib Rizieq disebut justru ikut bergabung dalam kerumunan dan membiarkan acara yang dihidirikan berlangsung selama 3 jam.

Jaksa menilai perbuatan Habib Rizieq melanggar keputusan Bupati Bogor. Keputusan tersebut terkait perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ● han

## Kejagung Periksa Dua Saksi Kasus Korupsi Asabri

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung memeriksa dua orang saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri. Dua saksi yang diperiksa yaitu MI selaku sekretaris tersangka Heru Hidayat di PT Maxima Integra dan ST selaku Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (17/5).

Sebagai informasi, terkait perkara ini pihak Kejaksanaan Agung telah menetapkan sembilan orang tersangka. Kesembilan tersangka di

antaranya, yaitu Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation.

Kemudian tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja. Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 dan HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019. Ada pula IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017, Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, dan LP sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. Saat ini penyidik Kejaksanaan Agung sudah mulai melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ● mei

# Materi TWK Pegawai KPK Dinilai Aneh, Agus Raharjo Minta KASN Turun Tangan

Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap aneh dan tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan, misalnya, terkait doa kunut atau sikap terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

JAKARTA (IM) – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ikut menjelaskan soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang menuai polemik.

Pasalnya, Agus menilai materi pertanyaan dalam TWK aneh dan tidak relevan, misalnya mengenai tanggapan terkait doa kunut. Ada pula pertanyaan yang bersifat privat tentang pernikahan.

“Saya dalam hal ini sangat minta Komisi ASN kemudian bisa bisa turun tangan untuk menjelaskan permasalahan ini,” kata Agus dalam acara bertajuk Menilik Pelemahan KPK Melalui Pemberhentian 75 Pegawai, Senin (17/4).

Agus berpandangan, seharusnya materi soal TWK sebagai bagian peralihan status pegawai KPK tidak berbeda

dengan tes ASN lainnya. Oleh sebab itu ia mendorong KASN untuk menelusuri materi soal TWK yang sudah beredar di media sosial.

“Kan itu enggak boleh kemudian khusus untuk pegawai KPK yang mau jadi ASN kemudian tesnya dibedakan, sudah berbeda, kemudian kabarnya materinya sangat aneh,” ucapnya.

“Ini kan kalau mau saya diskriminasinya di sini, ini yang kemudian perlu kita kita telusuri betul apa memang isinya seperti yang beredar di media sosial itu ya,” lanjutnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap aneh dan tidak sesuai dengan kepentingan kebangsaan, misalnya, terkait doa kunut atau sikap terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender).

Sejumlah pihak pun memberikan kritik serta menilai

upaya tes tersebut merupakan langkah untuk menyingkirkan 75 pegawai di KPK itu.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, TWK yang dilakukan terhadap pegawai KPK berbeda dengan tes bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan bagi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS,” kata Paryono dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5) lalu.

Paryono menjelaskan, CPNS merupakan calon karyawan dalam jenjang pemula atau posisi entry level, sehingga TWK terhadap CPNS berupa pertanyaan soal pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sementara, pegawai KPK dianggap sudah menduduki jabatan senior. Oleh karena itu, diperlukan jenis TWK berbeda.

“Sehingga diperlukan jenis tes yang berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

## Tahanan Kabur Usai Siram Air Cabai ke Petugas di Sumut Serahkan Diri

MEDAN (IM) - Satu dari lima tahanan BNN Sumatera Utara (Sumut) yang kabur usai menyiramkan air cabai dan mengorok petugas menyerahkan diri.

empat tahanan lainnya yang kabur. Dia meminta para tahanan yang kabur itu menyerahkan diri.

“Terus kita buru,” ujar Sempana.

Sebelumnya, lima tahanan BNN Sumut kabur dari sel tahanan. Kasus tersebut bermula dari beberapa tahanan yang berteriak minta air minum.

Dilansir Antara, Senin (17/5), para tahanan tiba-tiba menyiramkan cairan cabai ke petugas jaga yang hendak memasukkan galon air ke kamar sel.

Mereka lalu mendorong serta memukul petugas. Saat petugas melakukan perlawanan dan menguasai pintu sel Blok B agar tahanan tidak melarikan diri, petugas kembali dipu-

kuli, dipegang, serta ditarik ke dalam lorong sel.

Kelima tahanan lalu kabur dari Blok B kamar 1 di kantor BNN Sumut. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (16/5) sekitar pukul 00.28 WIB. Kelimanya ialah Marzuki Ahmad alias Tengku, Rahmat Hidayatullah alias M Isbandi, M Junaidi, Irwanda, dan Zulfikar.

Awalnya ada enam orang tahanan yang kabur. Namun salah seorang bernama Salim Saragih yang belum jauh melarikan diri dari kantor BNN Sumut telah ditangkap.

“Saat ini petugas BNN Sumut masih terus melakukan pencarian terhadap lima tahanan yang melarikan tersebut,” kata Kombes Sempana Sitepu. ● han



75 PEGAWAI KPK LAPORKAN ANGGOTA DEWAS KPK INDRIANTO SENO ADJI Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko (kiri) didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPA lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) tersebut melaporkan Dewas KPK Indriyanto Seno Adji yang diduga telah melakukan pelanggaran etik sebagai anggota Dewas, berupa turut serta dalam kegiatan operasional.

Paryono juga menekankan, banyak pihak yang dilibatkan dalam proses asesmen. Instansi tersebut yakni Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS, dan Pusat Intelijen TNI AD.

## Lakukan Advokasi

Para pegawai KPK yang tak lolos TWK akan terus melakukan langkah advokasi. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko mengatakan, proses advokasi akan ditempuh melalui jalur legal dan publik.

“Kita akan terus meneruskan melakukan advokasi baik secara legal dan publik,” kata Sujanarko pada wartawan, di

depan Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/5).

Sujanarko yang hadir sebagai perwakilan 75 anggota KPK itu menyebut, advokasi secara publik perlu juga dilakukan karena KPK merupakan salah satu aset publik.

“Kenapa (advokasi) publik ini penting karena KPK adalah salah satu aset publik dan yang dihadapi 75 orang itu adalah sebagian dari anggota-anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan sebagian dari pimpinan KPK yang tidak kompeten,” tuturnya.

Adapun Sujanarko dalam kesempatan tersebut bersama Novel Baswedan melaporkan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji dalam dugaan pelanggaran kode etik. ● han

## PPKM Mikro Diperpanjang Selama Dua Minggu Lagi

JAKARTA (IM) - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut mobilitas masyarakat di tempat wisata meningkat selama masa libur Lebaran. Peningkatan terjadi di sejumlah daerah dengan persentase mencapai 38 hingga 100 persen.

“Seminggu sebelum Lebaran dan empat hari di akhir pekan pada saat Lebaran yang kenaikannya 38-100 persen, terutama di Jakarta, kemudian juga di Subang, dan Pangandaran,” kata Airlangga, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTUBE Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Bahkan, kata Airlangga, masih ada sejumlah tempat wisata di zona oranye Covid-19 yang tetap beroperasi selama libur Lebaran. Padahal, sebelumnya pemerintah telah menginstruksikan agar tempat wisata yang berada di zona oranye dan merah ditutup sementara guna menghindari penularan virus corona.

“Di wilayah oranye beberapa yang masih dibuka dan ini yang kemarin diarahkan kepada pemda untuk menutup lokasi-lokasi (wisata) yang di daerah oranye,” ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, mobilitas penduduk jelang libur Lebaran kemarin memang relatif tinggi. Di Maluku Utara misalnya, kenaikan mobilitas penduduk hampir mencapai 100 persen, di Sulawesi Barat 74 persen, dan Gorontalo 72 persen.

Selain itu, diperkirakan 1,5 juta warga keluar dari Jakarta dan nekat pulang ke kampung halaman selama masa liburan mudik Lebaran. Mayoritas warga mudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa dan sebagian lainnya ke Pulau Sumatera.

“Bahwa kemarin yang mudik, yang keluar dari Jakarta sebesar 1,5 juta, ke Sumatera sekitar 440.000 dan mudik di Jawa sekitar 1.023.290 orang,” ungkapnya.

Dengan catatan tersebut, pemerintah terus memantau perkembangan Covid-19. Di harapkan, mobilitas penduduk dalam jumlah besar ini tak berakibat pada peningkatan kasus virus corona. Pemerintah juga menempuh berbagai upaya untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19. Misalnya, melakukan tes acak untuk para pemudik yang kembali dari kampung halaman menuju ke wilayah DKI. Kemudian,

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Tentunya kita berharap bahwa mereka yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang naik itu sudah aman dari Covid,” kata Airlangga.

Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama dua minggu. Sebagaimana diketahui PPKM Mikro tahap ketujuh sudah berakhir Senin (17/5).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terkait perpanjangan PPKM mikro.

“Hari ini akan ditandatangani Perpanjangan Inmen PPKM Mikro mulai 18 Mei sampai 31 Mei 2021,” katanya saat dihubungi, Senin (17/5).

Dia mengatakan Inmendagri akan mengatur perpanjangan waktu. Selain itu, tidak ada perluasan cakupan PPKM Mikro.

“Tidak ada perluasan/penambahan provinsi. Tetap 30 provinsi. Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana diatur terdahulu,” ujarnya.

Perlu diketahui 30 daerah cakupan PPKM mikro antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, dan Papua. Lalu Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat. Selanjutnya Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat. ● han

## PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan Sirkuler RUPSLB PT ANUGRAH PASHA MEDIKA, berkedudukan di Jakarta Utara, tertanggal 10 Mei 2021 diputuskan membubarkan Perseroan serta menunjuk EDWIN ALEXANDY selaku Likuidator Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan atas pembubaran Perseroan dapat diajukan kepada:

Kementerian HUKUM DAN HAM RI, Jl. HR Rasuna Said kav 6-7 Jakarta Selatan,

Dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 18 Mei 2021  
DIREKTUR  
EDWIN ALEXANDY